

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana kegiatan langsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan “Turan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Siti Resmi, 2013 : 1).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementrian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut cenderung naik dari tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan Negara diharapkan untuk semakin besar tiap tahunnya namun pada tahun 2012 sampai tahun 2013 yang terealisasi belum dapat mencapai target atau masih dibawah target meskipun setiap tahun mengalami kenaikan dalam realisasinya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2011 sampai 2013

Tahun	Target	Realisasi
2011	Rp. 217,571,670,000	Rp. 217,684,281,460
2012	Rp. 291,965,631,276	Rp. 251,956,837,001
2013	Rp. 335,513,440,797	Rp. 279,344,464,822

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban, diolah

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan pajak kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak . Sesuai ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerimaan pajak yang selalu meningkat dibutuhkan kinerja yang sangat baik. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau

kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mohamad Mahsun, 2013 : 25).

Pengukuran kinerja merupakan “Suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas” (Mohammad Mahsun, 2013 : 26). Untuk pengukuran kinerja penerimaan pajak disini menggunakan Tingkat Efektivitas dan Analisis Perbandingan. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi dan target dari penerimaan pajak setiap tahunnya sedangkan pengukuran menggunakan analisis perbandingan untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak dalam presentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio.

Faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan, misalnya Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu. Kondisi ini mendorong dalam pengukuran kinerja penerimaan pajak, pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Dari penjelasan diatas maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN”**

1.2 Penjelasan Judul

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham terhadap judul tugas akhir ini, maka penyusun akan memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tugas akhir tersebut.

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam *strategic planning* suatu organisasi.
3. Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban adalah instansi pemerintahan yang menangani kewajiban perpajakan di daerah Tuban.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperoleh informasi dalam penulisan laporan Tugas Akhir, maka dalam pembahasan ini akan melakukan perumusan masalah yang dibahas dalam laporan tersebut, sebagai berikut : Bagaimana analisis kinerja penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui analisis kinerja penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui lebih detail mengenai Kinerja Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.

2. Bagi Pembaca

Penelitian yang telah dilakukan penulis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak secara signifikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, maka ruang lingkup pembahasannya hanya dibatasi pada uraian mengenai “Analisis Kinerja Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban”

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penelitian, maka metode yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Metode Interview

Yaitu, Metode ini dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data-data yang terkait dengan materi penulisan Tugas Akhir.

2. Metode Data Sekunder

Yaitu, Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku , catatan-catatan maupun data-data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.

3. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data yang telah tersedia dalam buku-buku dan melalui internet.